



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : ROHIMAT
- Jabatan : KEPALA BGP PROVINSI LAMPUNG
- NHK : 411449

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.191.150.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/120 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 465.100.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/140 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 465.050.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/161 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 261.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 398.300.000

- MOBIL, DATSUN GO + PANCA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
- MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- MOBIL, MITSHUBISHI XPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
- MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
- MOTOR, YAMAHA PAGIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 21.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 207.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 277.552.009

F. HARTA LAINNYA Rp. ---



Sub Total	Rp.	2.074.002.009
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.074.002.009

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.